

Pembantaian Sabra dan Shatila

Pada fajar abad ke-20, kehadiran Yahudi di Palestina masih sederhana: sebaran **kibbutzim** pertanian, beberapa komunitas urban, dan kebangkitan bahasa Ibrani yang sebagian besar terbatas pada liturgi dan beasiswa. Pemandangan mulai berubah dengan **Perjanjian Haavara (Transfer)** tahun 1933 dan **Konferensi Evian** tahun 1938, keduanya—dengan cara yang sangat berbeda—memfasilitasi emigrasi Yahudi dari Eropa yang dikuasai Nazi. Dalam beberapa tahun, imigrasi melipatgandakan populasi Yahudi di Palestina beberapa kali, mengubah keseimbangan demografis dan cakrawala politik tanah itu.

Deklarasi Balfour tahun 1917, yang kemudian dimasukkan ke dalam syarat-syarat **Mandat Britania**, berjanji dukungan untuk “pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina”, sementara—yang krusial—menetapkan bahwa “tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada”. Namun, sejak hari-hari awal gerakan Zionis, kepemimpinannya telah berbicara tentang *penaklukan* dan *kolonisasi* sebagai tahap-tahap yang diperlukan menuju negara. Pemikir seperti Theodor Herzl, Chaim Weizmann, dan kemudian David Ben-Gurion, tidak memperdebatkan apakah harus ada entitas Yahudi di Palestina, melainkan bagaimana mengamankan dan memperluasnya di tanah yang sudah dihuni.

Bagi penduduk asli—Muslim, Kristen, dan Yahudi sama-sama—prospek imigrasi skala besar di bawah mandat kolonial memicu kecemasan sekaligus perlawanannya. Pemberontakan Arab akhir tahun 1930-an mencerminkan ketakutan bahwa apa yang disajikan sebagai tempat perlindungan dari penganiayaan Eropa, pada praktiknya, menjadi alat perampasan. Apa yang dimulai sebagai komunitas paralel di bawah kekuasaan Ottoman sedang dibentuk ulang menjadi proyek nasional yang bersaing di bawah pengawasan Britania.

Nakba

Pada November 1947, **Rencana Pembagian PBB (Resolusi 181)** mengusulkan pembagian tanah menjadi dua negara, mengalokasikan **56 persen Palestina** untuk populasi Yahudi, yang saat itu merupakan sekitar sepertiga penduduk dan memiliki sekitar **7 persen tanah**. Bagi mayoritas Arab Palestina, ini tampak kurang seperti kompromi daripada perampasan yang disahkan oleh dekrit internasional. Ketika perang saudara meletus antara komunitas dan Britania mundur, pasukan Zionis bergerak cepat untuk mengamankan dan memperluas wilayah yang dialokasikan untuk mereka.

Pada 1948, peristiwa-peristiwa mempercepat di luar ingatan. Perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh paramiliter Zionis—khususnya **Irgun** dan **Lehi**—melawan komunitas Arab dan administrasi Britania meluas menjadi pemberontakan terbuka. Peledakan dan pembunuhan mereka mencapai jauh melampaui Palestina; satu serangan bahkan

menghantam **kedutaan Britania di Roma**. Kehabisan tenaga dan semakin tidak mampu menahan kekerasan, **Britania melepaskan mandatnya**, menyerahkan pertanyaan rumit Palestina kepada **PBB** yang baru dibentuk.

Hasilnya adalah **Nakba**—“Bencana”—di mana lebih dari **700.000 warga Palestina** diusir atau melarikan diri dari rumah mereka di tengah kampanye sistematis intimidasi dan penghancuran. Desa-desa dihancurkan, keluarga tersebar ke negara-negara Arab tetangga, dan masyarakat nasional dibongkar hampir dalam semalam. PBB mengakui penderitaan mereka melalui **Resolusi 194** (Desember 1948), yang menegaskan hak pengungsi untuk kembali atau menerima kompensasi. Namun, janji itu tidak pernah ditegakkan. Ketidaktegakannya memungkinkan Israel mengkonsolidasikan perbatasannya yang baru dan negara-negara tuan rumah Arab memperlakukan kehadiran pengungsi sebagai *sementara*—kondisi sementara yang telah bertahan lebih dari tujuh dekade.

Diaspora Palestina

Kekerasan tahun 1948 meninggalkan pemandangan reruntuhan dan pengasingan. Antara **10.000 dan 15.000 warga Palestina** tewas selama pertempuran sementara ribuan lainnya terluka dalam pembantaian dan pengusiran yang dilakukan saat kota dan desa jatuh. Penelitian kontemporer, termasuk dokumentasi teliti sejarawan **Walid Khalidi** dalam *All That Remains*, mencatat penghancuran **lebih dari 400 desa Palestina**, beberapa dihapus sepenuhnya dari peta, reruntuhannya kemudian dibangun kembali dengan pemukiman Israel baru atau hutan yang ditanam oleh Dana Nasional Yahudi untuk menyembunyikan jejak hunian.

Pada musim panas 1949, **populasi pengungsi telah mencapai sekitar 750.000**, dari populasi Arab pra-perang sebanyak 1,2 juta. Keluarga melarikan diri dalam gelombang: pertama dari kota-kota pantai seperti Yaffa, Haifa, dan Akka; kemudian dari Galilea dan dataran tinggi tengah saat milisi Zionis—segera terintegrasi ke **Pasukan Pertahanan Israel (IDF)**—maju di bawah **Rencana Dalet**, cetak biru strategis yang mengotorisasi pengosongan wilayah yang dianggap bermusuhan atau vital secara strategis.

Negara-negara tetangga menyerap gelombang manusia secara tidak merata.

- **Yordania** menerima bagian terbesar, sekitar **350.000**, banyak di antaranya kemudian memperoleh kewarganegaraan Yordania.
- **Gaza**, di bawah administrasi Mesir, menerima sekitar **200.000**, membengkakkan jalur sempitnya menjadi salah satu area terpadat di bumi.
- **Lebanon** menerima sekitar **100.000-120.000**, yang ditempatkan di kamp-kamp yang dibangun secara tergesa-gesa di sekitar Tirus, Sidon, dan Beirut.
- **Suriah** menerima **80.000-90.000**, dan memukimkan mereka di sekitar Damaskus dan Aleppo. Jumlah yang lebih kecil mencapai **Irak** dan **Mesir yang sebenarnya**, meskipun pengungsi ini sering berpindah lagi mencari stabilitas dan pekerjaan.

PBB mendirikan **Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA)** pada 1949 untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, mandat badan itu—yang dimaksudkan sebagai langkah kemanusiaan sementara

menunggu repatriasi—menjadi kerangka limbo permanen. Sementara **Resolusi 194** mengakui hak pengungsi untuk kembali, baik komunitas internasional maupun Negara Israel yang baru tidak mengambil langkah untuk menerapkannya. Negara-negara tuan rumah Arab, dengan mengutip resolusi yang sama, menolak memberikan kewarganegaraan, bersikeras bahwa hal itu akan melegitimasi penolakan Israel untuk memulangkan yang terlantar. Dengan demikian, sejak awal, pengungsi tahun 1948 terperangkap antara dua penyangkalan: penyangkalan kembalinya dan penyangkalan kepemilikan.

Pengungsi Palestina di Lebanon

Lebanon, negara tetangga Palestina yang terkecil, menanggung beban yang tidak proporsional dengan ukurannya dan jaringan sosial yang rapuh. Ketika gelombang pengungsi pertama melintasi perbatasannya selatan pada 1948, mereka tiba kelelahan, sering kali berjalan kaki atau dengan keledai, hanya membawa kunci rumah mereka dan akta kepemilikan properti yang hilang. Sekitar **100.000 hingga 120.000 warga Palestina** memasuki Lebanon antara 1948 dan 1949—sekitar seperenam dari total populasi pengungsi yang diciptakan oleh perang. **Badan Bantuan PBB (UNRWA)** yang baru dibentuk mendaftarkan **127.000** di antaranya pada 1952, menempatkan keluarga di kamp-kamp sementara dekat Tirus, Sidon, Tripoli, dan pinggiran Beirut.

Penerimaan Lebanon dibentuk oleh **keseimbangan konfesionalnya sendiri**—pembagian halus kekuasaan antara Kristen Maronit, Muslim Sunni dan Syiah, dan Druze—and ketakutan yang meluas bahwa memberikan kewarganegaraan kepada puluhan ribu pengungsi sebagian besar Sunni akan mengganggu keseimbangan itu. Tidak seperti Yordania, yang kemudian menaturalisasi banyak warga Palestina, Lebanon mempertahankan mereka **tanpa kewarganegaraan**, menawarkan residensi tapi bukan kewarganegaraan. Mereka diberi label *tamu*, istilah yang menyiratkan baik perlindungan sementara maupun eksklusi politik.

Pada awalnya, pengungsi tinggal di tenda yang didirikan di lahan berlumpur, bergantung pada jatah UNRWA dan bantuan darurat. Seiring waktu, tenda-tenda digantikan oleh gubuk beratap seng dan, kemudian, pondok beton, tapi **ketidakkekalan hukum** mereka tetap dikodifikasi. Menurut undang-undang, warga Palestina dilarang memiliki properti, bergabung dengan serikat pekerja, atau bekerja di lebih dari tujuh puluh profesi, termasuk kedokteran, hukum, dan teknik. Pergerakan antara kamp dan kota memerlukan izin; akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan bergantung pada sistem UNRWA yang selalu kekurangan dana.

Dua belas kamp resmi akhirnya terbentuk, dari **Ain al-Hilweh** dekat Sidon—sekarang yang terbesar di Lebanon—hingga **Shatila** dan **Bourj el-Barajneh** di Beirut. Kepadatan segera mencapai tingkat yang mencengangkan: di Shatila, **30.000 orang tinggal dalam kurang dari setengah kilometer persegi**. Infrastruktur minimal; sistem saluran pembuangan dan air membusuk; listrik berkedip selama beberapa jam sehari. Namun, di tengah kemiskinan, kamp-kamp juga menjadi ruang ketahanan—dengan sekolah, klinik, dan organisasi politik yang mempertahankan identitas kolektif yang berlabuh pada *hak untuk kembali*.

Pihak berwenang Lebanon, didukung oleh sebagian besar kelas politik, bersikeras bahwa kehadiran Palestina bersifat sementara. Keteguhan ini bukan hanya demografis tapi ideologis: mengintegrasikan pengungsi, dikatakan, akan melarutkan klaim itu sendiri bahwa mereka harus suatu hari kembali ke tanah air mereka. Akibatnya, **pengasingan Palestina di Lebanon menjadi kondisi kemanusiaan sekaligus pernyataan politik**— sebuah kesaksian yang terlihat dari luka yang dunia Arab bersumpah tidak akan sembuhkan secara prematur.

Hak Kembali

Selama beberapa dekade, kamp-kamp bukan hanya geografi pengasingan tapi darurat moral yang membara lambat. Bayangkan generasi yang lahir di dalam gang-gang beratap tenda di mana rumah kakek-nenek Anda hanya ada dalam ingatan kunci yang disimpan di bawah bantal—di mana Anda diberitahu, berulang kali dan secara resmi, bahwa Anda mungkin tidak pernah termasuk. Setelah lebih dari tiga puluh tahun di mana **hak kembali** tetap janji di atas kertas, resolusi PBB bergema tapi tidak ditegakkan, dan negara tuan rumah memperlakukan pengungsian sebagai masalah administratif sementara, banyak warga Palestina di Lebanon menghadapi aritmatika suram: tanpa kewarganegaraan, pekerjaan terbatas, pendidikan dibatasi, dan tidak ada rute hukum untuk merebut kembali tanah atau martabat. Kemiskinan bukan hanya material; itu yuridis: kondisi yang diproduksi dan diperkuat oleh undang-undang dan kebijakan yang membuat permanen tidak mungkin.

Tidak sulit melihat bagaimana kondisi seperti itu meradikalisasi. Ketika obat-obatan diplomatik terhenti dan lembaga internasional gagal memberikan penegakan, orang biasa sering meraih alat yang dalam jangkauan mereka—politik terorganisir dulu, dan kemudian, bagi sebagian, perlawanan bersenjata. Kemunculan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan kelompok gerilya konstituennya harus dibaca terhadap latar belakang perampasan itu. Bagi banyak pengungsi, mengambil senjata bukan ideologi abstrak tapi respons konkret terhadap penghinaan sehari-hari: penyangkalan hak sipil dan ekonomi dasar, penyegelan perbatasan, dan penghapusan rumah yang lambat. Bagi populasi yang menyaksikan desa-desa dihancurkan dan tetangga diusir pada 1948, dan kemudian melihat sistem internasional mengakui hak mereka tanpa menegakkannya, kekerasan mulai terlihat seperti satu-satunya bahasa yang mampu menghasilkan perhatian, pengaruh, dan—seberapa tragis—keamanan.

Logika manusia itu membantu menjelaskan mengapa faksi bersenjata mendirikan basis di dalam dan sekitar kamp-kamp, mengapa mereka mengorganisir layanan sosial di sana, dan mengapa kamp-kamp dengan waktu menjadi militerisasi. Itu tidak memaafkan kerusakan yang menyusul. Operasi gerilya di seberang perbatasan Israel mengundang pembalasan yang jatuh secara berlebihan pada warga sipil; hukuman kolektif memperdalam ketakutan Lebanon dan menyediakan dalih untuk langkah-langkah yang lebih keras. Singkatnya, pergeseran ke kekerasan menciptakan lingkaran umpan balik: ketidakberkewarganegaraan dan marginalisasi mendorong bagian populasi pengungsi ke militansi; militansi memicu respons militer dan delegitimasi politik; respons tersebut memperkuat eksklusi pengungsi.

Dilihat seperti itu, invasi 1982—dan pembantaian yang akan menyusul di Sabra dan Shatila—bukanlah pemutusan spontan tapi titik akhir katastrofik dari rantai yang ditempa oleh hak yang gagal, pengobatan yang terpotong, dan siklus pembalasan yang meningkat. Kompleksitas moral jelas: negara dan sistem internasional yang memproduksi limbo kamp-kamp bertanggung jawab atas penciptaan kondisi di mana orang merasa terpaksa melawan—tapi perlawanan yang mengambil bentuk kekerasan, terutama ketika menargetkan warga sipil, juga menghasilkan korban baru dan memperlebar jurang moral.

Hak untuk Melawan

Hukum internasional itu sendiri menawarkan dasar untuk bagaimana pilihan-pilihan itu dibenarkan kemudian. Di bawah **Konvensi Jenewa Keempat** dan **Protokol Tambahan I tahun 1977**, populasi yang hidup di bawah **pendudukan asing** memiliki hak untuk melawan pendudukan itu—termasuk, dalam keadaan tertentu, dengan cara bersenjata—selama perlawanan seperti itu menghormati larangan terhadap penargetan warga sipil. Majelis Umum PBB menegaskan prinsip ini berulang kali selama tahun 1960-an dan 1970-an dalam resolusi yang mengakui “legitimasi perjuangan rakyat di bawah dominasi kolonial dan asing untuk menjalankan hak mereka atas penentuan nasib sendiri”.

Apakah ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk warga Palestina **yang hidup dalam pengasingan** daripada langsung di bawah pendudukan adalah perdebatan. Tanah dan rumah mereka tetap di bawah kendali Negara Israel, namun mereka sendiri dikurung di wilayah tetangga, ditolak kembalinya, dan secara efektif tanpa kewarganegaraan. Bagi banyak pemikir dan ahli hukum Palestina, pengasingan itu tidak membantalkan hak untuk melawan; itu hanya memindahkan medan perang. Menurut mereka, hak untuk perlawanan bersenjata meluas ke rakyat yang *pendudukannya mengikuti mereka melintasi perbatasan*—melalui pengusiran, blokade, dan serbuan militer ke kamp pengungsi itu sendiri.

Dalam praktiknya, argumen hukum ini sedikit mengubah realitas yang dialami: Israel menganggap semua aktivitas bersenjata dari tanah Lebanon sebagai agresi, sementara Lebanon memperlakukan pejuang pengungsi sebagai tamu sekaligus liabilitas. Hasilnya adalah negara dalam negara—**kehadiran kuasi-otonom PLO di Lebanon Selatan**—yang ditoleransi oleh beberapa faksi dan dibenci oleh yang lain. Seiring berjalannya tahun 1970-an, kamp-kamp menjadi bukan hanya simbol perampasan tapi juga garis depan dalam konflik regional yang meluas.

PLO di Lebanon

Pada akhir tahun 1960-an, kamp pengungsi Lebanon telah menjadi pusat gerakan nasional Palestina dalam pengasingan. Setelah **Perang Enam Hari tahun 1967** dan pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza, kelompok perlawanan Palestina mendapatkan diri mereka tersebar di seluruh dunia Arab, basis mereka di Yordania, Suriah, dan Lebanon menjadi simpul perjuangan transnasional.

Pada **September 1970**, monarki Yordania mengusir PLO setelah perang saudara berdarah yang dikenal sebagai *September Hitam*. Ribuan pejuang melarikan diri ke utara melintasi perbatasan ke Lebanon, di mana kamp-kamp menawarkan perlindungan sekaligus perekut siap. Influx itu mengubah keseimbangan politik Lebanon. PLO membangun administrasi paralel—mengelola sekolah, rumah sakit, dan sistem kesejahteraan melalui **Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina**, sambil mengorganisir sayap bersenjata seperti **Fatah**, **Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP)**, dan **Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP)**.

Bagi banyak pengungsi, kedatangan PLO melambangkan pemberdayaan: untuk pertama kalinya sejak 1948, warga Palestina bukan hanya penerima bantuan tapi agen nasib mereka sendiri. Namun, bagi sebagian besar kelas politik Lebanon, itu tampak seperti negara dalam negara. Razia lintas batas ke Israel utara menarik serangan udara balasan yang membunuh warga sipil Lebanon dan menghancurkan infrastruktur, memperdalam kebencian di antara komunitas yang tidak memilih untuk menjadi tuan rumah perang.

Koeksistensi yang tidak nyaman antara negara Lebanon dan PLO diformalkan dalam **Perjanjian Kairo tahun 1969**, yang dimediasi Mesir. Itu memberikan otonomi terbatas kepada Palestina di dalam kamp-kamp dan hak untuk membawa senjata untuk tujuan perlawanan terhadap Israel—penghindaran tanpa preseden di wilayah kedaulatan Lebanon. Untuk sementara, pengaturan ini mempertahankan keseimbangan rapuh: Lebanon bisa mengklaim solidaritas dengan penyebab Palestina sambil melepaskan tanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan pengungsi.

Tapi seiring memburuknya ketegangan sektarian Lebanon sendiri, pengaturan itu runtuh. Kekuatan militer dan pengaruh politik PLO tumbuh, menyelaraskannya dengan faksi kiri dan Muslim dalam **perang saudara Lebanon 1975–1990**, sementara milisi Kristen sayap kanan, khususnya **Phalangis**, melihat warga Palestina sebagai ancaman demografis sekaligus tentara asing. Bentrokan antara Phalangis dan pasukan yang selaras dengan PLO meletus di seluruh Beirut dan selatan, mengubah lingkungan dan kamp menjadi garis depan.

Israel, yang mengamati kekacauan di seberang perbatasan, mulai melihat Lebanon bukan hanya sebagai ancaman keamanan tapi sebagai peluang. Kepemimpinan Israel berusaha menetralkan PLO secara militer sambil merintis aliansi dengan milisi Kristen yang berbagi musuh bersama. Mulai akhir tahun 1970-an, Israel memasok senjata, pelatihan, dan dukungan logistik ke **Tentara Lebanon Selatan (SLA)** dan elemen **gerakan Phalangis**, secara efektif membangun pasukan proksi di sepanjang perbatasannya utara.

Pada **Maret 1978**, setelah serangan PLO ke jalan raya pantai Israel yang membunuh tiga puluh delapan warga sipil, Israel meluncurkan **Operasi Litani**, menyerbu hingga Sungai Litani dan membunuh lebih dari seribu warga sipil Lebanon dan Palestina. Meskipun operasi itu dibenarkan sebagai langkah kontra-terorisme, tujuan mendasarnya adalah mendorong PLO ke utara dan mendirikan zona penyangga yang dipatroli SLA. **Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL)** dikerahkan sebagai respons, tapi mandatnya lemah dan kehadirannya sebagian besar simbolis.

Beberapa tahun berikutnya menyaksikan siklus eskalasi: razia PLO, serangan udara Israel, tembakan balasan, dan pengikisan bertahap kedua belah pihak. Pada **1981**, pejabat Israel mengklaim lebih dari dua ratus kematian Israel tahunan dari tembakan lintas batas, sementara kota-kota Lebanon menderita pemboman rutin sebagai balasan. Pada periode yang sama, **Ariel Sharon**, Menteri Pertahanan Israel saat itu, merancang rencana yang lebih luas—untuk menghancurkan PLO secara militer, mengusirnya dari Lebanon, dan memasang pemerintahan yang dipimpin Kristen ramah di Beirut.

Invasi 1982: Operasi Perdamaian untuk Galilea

Pada **6 Juni 1982**, Israel meluncurkan invasi skala penuh ke Lebanon di bawah nama sandi **Operasi Perdamaian untuk Galilea**. Secara resmi, tujuan yang dinyatakan terbatas: mendorong pasukan gerilya Palestina empat puluh kilometer utara perbatasan untuk menghentikan tembakan roket lintas batas. Kenyataannya, ruang lingkup operasi telah digambar jauh lebih ambisius oleh Menteri Pertahanan **Ariel Sharon** dan disetujui oleh Perdana Menteri **Menachem Begin**. Tujuan yang tidak diungkapkan termasuk penghancuran **infrastruktur militer dan politik PLO**, pengusiran kepemimpinannya dari Lebanon, dan pemasangan pemerintahan pro-Israel di Beirut di bawah **Bashir Gemayel**, pemimpin Phalangis Maronit.

Skala serangan mengungkapkan niat sebenarnya. Hampir **60.000 tentara Israel**, didukung oleh **800 tank, brigade lapis baja, dan skuadron udara**, melintasi perbatasan dalam dorongan terkoordinasi di sepanjang pantai, melalui dataran tinggi tengah, dan di Lembah Bekaa timur. Invasi dengan cepat meliputi posisi UNIFIL dan desa-desa Lebanon, maju jauh melampaui batas 40 kilometer dalam hari-hari. Pada 8 Juni, pasukan Israel telah merebut **Tirus dan Sidon**; pada 14 Juni, **Beirut** sendiri dikepung—kota dengan hampir satu juta warga sipil, kini di bawah pengepungan.

Biaya manusia itu mencengangkan. Menurut perkiraan pemerintah Lebanon, **sekitar 17.000-18.000 orang**—sebagian besar warga sipil—tewas dalam fase awal perang, dan ribuan lainnya terluka. Seluruh lingkungan di Sidon dan Beirut Barat diratakan di bawah pemboman berkelanjutan. Jurnalis di lapangan, termasuk **Robert Fisk** dan **Thomas Friedman**, menggambarkan pemandangan kehancuran apokaliptik: rumah sakit yang beroperasi dengan lilin, mayat bertumpuk di gang, dan anak-anak membawa bendera putih saat mencari air.

Pengepungan Beirut

Pada akhir Juni, pejuang PLO yang tersisa—sekitar **11.000**—tergali di Beirut Barat, dikelilingi oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari darat, laut, dan udara. Pengepungan berlangsung hampir sepuluh minggu. Artileri dan serangan udara Israel menghantam kuartal padat penduduk siang dan malam, memutus listrik, makanan, dan pasokan medis. Rumah sakit seperti Rumah Sakit Gaza dan Makassed kewalahan. Jumlah korban bertambah setiap hari. Diplomat Barat membandingkan pemboman itu dengan pengepungan Stalingrad, mencatat bahwa daya tembak Israel terhadap populasi sipil yang terperangkap “sangat tidak proporsional”.

Kemarahan internasional meningkat. **Dewan Keamanan PBB** mengutuk invasi itu dalam **Resolusi 508**, menyerukan gencatan senjata segera. Utusan AS **Philip Habib** bernegosiasi tanpa lelah untuk memediasi gencatan senjata. Setelah berminggu-minggu tekanan, kesepakatan dicapai pada **Agustus 1982**:

- **PLO akan mengungsi** dari Beirut di bawah perlindungan **Pasukan Multinasional (MNF)** yang terdiri dari pasukan AS, Prancis, dan Italia.
- Israel akan menghentikan kemajuannya dan menjamin keselamatan warga sipil yang tertinggal.
- MNF akan tetap sementara untuk mengawasi transisi dan mencegah pembalasan.

Antara **21 Agustus** dan **1 September**, hampir **14.400 pejuang PLO** dan keluarga mereka meninggalkan Beirut ke Tunisia, Suriah, dan negara-negara Arab lainnya. Pengungsian dilakukan di bawah pengawasan internasional dan dipuji saat itu sebagai kesuksesan diplomatik—akhir yang teratur untuk pengepungan yang mungkin akhirnya menstabilkan Lebanon.

Tapi perdamaian terbukti ilusif. Israel tidak mundur dari pinggiran Beirut seperti yang dijanjikan; pasukannya tetap siaga di sekitar kota. Pada **14 September**, hanya hari-hari setelah konvoi PLO terakhir berlayar dari pelabuhan, ledakan besar merobek markas Phalangis di Beirut Timur, membunuh Presiden Terpilih **Bashir Gemayel**—sekutu utama Israel dan batu penjuru visi politik pasca-perang Sharon. Pembunuhan itu, yang dikaitkan dengan anggota Partai Nasionalis Sosialis Suriah, menghancurkan rencana Israel dan menenggelamkan Lebanon kembali ke dalam kekacauan.

Pembantaian Sabra dan Shatila

Ketika tank Israel memasuki **Beirut Barat** pada **15 September 1982**, lingkungan **Sabra** dan kamp pengungsi tetangga **Shatila** terletak di dalam area yang mereka segel dengan cepat. Ini adalah distrik padat penduduk, rumah bagi perkiraan **20.000–30.000 warga sipil**, sebagian besar pengungsi Palestina dan keluarga Syiah Lebanon miskin. Pejuang PLO terakhir telah meninggalkan kota dua minggu sebelumnya. Yang tersisa adalah warga sipil tak bersenjata—pria, wanita, anak-anak, dan orang tua—yang percaya bahwa mereka dilindungi oleh gencatan senjata yang dijamin oleh Amerika Serikat dan Israel.

Pembunuhan **Bashir Gemayel**, pemimpin Phalangis, memberikan dalih untuk pembalasan. Pada sore hari **16 September**, **Menteri Pertahanan Ariel Sharon** dan **Kepala Staf Rafael Eitan** bertemu dengan **komandan Phalangis**, termasuk **Elie Hobeika**, di pos komando depan Pasukan Pertahanan Israel dekat Bandara Internasional Beirut. Phalangis—sekutu dekat Israel—diizinkan memasuki kamp-kamp “untuk membasmi sis-sisa teroris”. Perwira Israel mengkoordinasikan logistik, menyediakan transportasi, dan mengelilingi area dengan pasukan dan kendaraan lapis baja. Mereka juga menembakkan **senter penerangan** sepanjang malam untuk memfasilitasi operasi milisi.

Begini di dalam, unit Phalangis mulai membunuh secara sembarangan. Selama **empat puluh jam berikutnya**, dari sore Kamis hingga pagi Sabtu, mereka bergerak dari rumah ke rumah, mengeksekusi keluarga-keluarga utuh, memperkosa wanita, dan mendorong

mayat ke lubang massal dengan bulldoser. Banyak korban ditembak dari jarak dekat; yang lain dibunuh dengan pisau atau granat. Para penyintas kemudian menggambarkan jalan-jalan yang berbaris mayat dan bau pembusukan yang memenuhi udara.

Sepanjang pembantaian, **tentara Israel mempertahankan barikade** di sekitar kamp-kamp, mengendalikan titik masuk dan keluar. Laporan kekejaman mulai menyusup ke komandan Israel melalui radio dalam hitungan jam. Pengamat dari **Palang Merah Internasional** dan jurnalis di distrik tetangga juga memperingatkan perwira IDF tentang pembunuhan massal. Namun, militer tidak campur tangan. Pembunuhan berlanjut selama hampir dua hari penuh sebelum milisi akhirnya diperintahkan keluar pada pukul 08.00 pagi **18 September**, setelah kemarahan internasional dan protes langsung AS.

Korban dan Bukti

Jumlah korban tewas tetap diperdebatkan tapi mengerikan dalam setiap hitungan.

- **Komite Internasional Palang Merah** melaporkan setidaknya **1.500 mayat yang dipulihkan**, dengan total kematian mungkin mencapai **3.000**.
- **Penyelidikan Majelis Umum PBB (1982)** memperkirakan antara **2.750 dan 3.500** tewas.
- **Komisi Kahan Israel** mengonfirmasi **700-800** korban yang diidentifikasi tapi mengakui bahwa banyak lagi yang tewas.

Di antara yang tewas ada warga Palestina, Syiah Lebanon, dan beberapa Suriah—hampir seluruhnya warga sipil.

Tanggung Jawab dan Keterlibatan

Meskipun pembantaian dilakukan oleh **milisi Phalangis**, **keterlibatan struktur komando Israel** dalam memungkinkan operasi itu tidak dapat disangkal. Pasukan Israel telah:

- **Mengotorisasi** masuknya Phalangis ke kamp-kamp.
- **Mengelilingi** area, mencegah warga sipil melarikan diri.
- **Menerangi** langit malam untuk kenyamanan para pembunuh.
- **Menerima laporan** tentang pembunuhan massal dan tidak melakukan apa-apa selama hampir dua hari.

Ketika jurnalis internasional pertama—termasuk **Robert Fisk, Loren Jenkins, dan Janet Lee Stevens**—memasuki Shatila pada 18 September, mereka menemukan mimpi buruk: gang-gang tersumbat mayat, lubang bulldoser penuh mayat, dan penyintas yang berkeliaran dalam syok. Gambar-gambar itu membakar kesadaran global dan menghancurkan klaim Israel bahwa ia mencari “perdamaian untuk Galilea”.

Penyelidikan dan Reaksi Global

Pembantaian itu memicu kemarahan internasional segera. **Majelis Umum PBB**, dalam **Resolusi 37/123** (Desember 1982), mengutuknya sebagai “tindakan genosida” dan memegang Israel bertanggung jawab atas kegagalannya mencegahnya. Di Israel sendiri,

kemarahan publik mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya: perkiraan **400.000 orang**—hampir sepersepuluh populasi—berbaris di **Tel Aviv** menuntut pertanggungjawaban.

Di bawah tekanan publik, pemerintah Israel mendirikan **Komisi Kahan untuk Penyelidikan** pada 1983. Temuan-temuannya menghukum, meskipun dirumuskan dengan hati-hati. Komisi memutuskan bahwa:

- Israel memikul **“tanggung jawab tidak langsung”** atas pembantaian.
- **Ariel Sharon** “secara pribadi bertanggung jawab” atas kegagalannya mengambil tindakan untuk mencegah pertumpahan darah meskipun peringatan yang jelas.
- Pejabat senior lainnya, termasuk **Rafael Eitan**, memikul “kesalahan pribadi”.

Sharon dipaksa mundur sebagai Menteri Pertahanan, meskipun tetap di kabinet dan, dua dekade kemudian, menjadi Perdana Menteri. Tidak ada perwira Israel atau Phalangis yang pernah diadili secara pidana atas pembantaian itu. Pada 2001, penyintas mencari keadilan melalui **kasus kejahatan perang Belgia** terhadap Sharon dan lainnya, tapi kasus itu dibatalkan atas dasar yurisdiksi pada 2003.

Pasukan Multinasional (MNF)—yang mundur sebelumnya meninggalkan kamp-kamp tak terlindungi—kembali ke Beirut akhir September 1982, tapi kehadirannya tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Dalam bulan-bulan, kekerasan baru meletus: bom bunuh diri terhadap pasukan AS dan Prancis, penarikan pasukan Barat, dan penurunan Lebanon lebih dalam ke dalam kekacauan. Di tengah reruntuhan Beirut Barat, penyintas Sabra dan Shatila mengubur mayat mereka di lubang massal yang digali tergesa-gesa dan memulai pekerjaan panjang yang tak terlihat dari berduka.

Di **Lebanon**, Sabra dan Shatila memperdalam luka sektarian. Bagi milisi Kristen, itu mengeraskan warisan rasa bersalah dan pembalasan; bagi komunitas Syiah dan Palestina, itu menjadi simbol pengumpulan penderitaan dan ketidakadilan. Perang saudara berlanjut selama delapan tahun lagi, meninggalkan sekitar **150.000 tewas** sebelum **Perjanjian Taif (1989)** akhirnya memulihkan perdamaian yang rapuh. Namun, pengungsi tetap dikecualikan dari pakta nasional kesepakatan itu, masih tanpa kewarganegaraan atau hak properti, masih terkurung di kamp-kamp yang menjadi rumah orang tua dan kakek-nenek mereka.

Secara internasional, pembantaian itu mengungkap batasan hukum kemanusiaan ketika kekurangan kemauan politik. **Resolusi PBB, Konvensi Jenewa**, dan konsep **“tanggung jawab untuk melindungi”** yang sedang lahir semuanya menyatakan kewajiban untuk mencegah kekejaman, namun tidak ada yang diterjemahkan menjadi penegakan yang efektif. Kasus kejahatan perang Belgia awal 2000-an membuka kembali pertanyaan pertanggungjawaban secara singkat tapi akhirnya dibatasi oleh reformasi yurisdiksi. Hingga hari ini, tidak ada pengadilan yang mengadili pembunuhan di Sabra dan Shatila.

Secara budaya, pembantaian itu bertahan sebagai luka sekaligus cermin. Film seperti **Waltz with Bashir karya Ari Folman** (2008) mengeksplorasi kenangan angker tentara Israel tentang keterlibatan; karya sastra seperti **Gerbang Matahari karya Elias Khoury**

dan **Pity the Nation** karya Robert Fisk mendokumentasikan kehancuran manusia dengan keintiman yang membakar. Bagi warga Palestina, peringatan setiap September kurang sebagai peringatan daripada ritual kelanjutan—peringat bahwa ketidakberkewarganegaraan yang sama yang meninggalkan mereka tak terlindungi pada 1982 bertahan hari ini di kamp-kamp Lebanon dan di seluruh wilayah pendudukan.

Empat dekade kemudian, **Sabra dan Shatila** tetap lebih dari episode historis; itu adalah tonggak moral. Itu memaksa konfrontasi dengan konsekuensi pengungsian yang tak tersembuhkan, janji yang tak ditegakkan, impunitas yang tak tertantang. Itu menunjukkan bahwa ketika seluruh rakyat dirampas dari kepemilikan hukum, kekerasan menjadi bukan penyimpangan tapi keniscayaan yang menunggu waktunya.

Penyintas pembantaian kini sudah tua, kenangan mereka memudar ke dalam catatan sejarah, tapi kesaksian mereka bertahan sebagai peringatan—bahwa hak-hak yang tak berkewarganegaraan adalah ukuran hati nurani dunia. Pada akhirnya, Sabra dan Shatila bukan hanya cerita pembantaian; itu adalah cerita pertanyaan abad ke-20 yang tak selesai: *seberapa lama keadilan bisa ditunda sebelum sejarah mengulangi dirinya?*

Epilog: Geografi Pengasingan

Nakba dan **Sabra dan Shatila** bukan tragedi terisolasi tapi bab-bab dari kontinum tunggal—sejarah manusia yang dibuat tak terlihat oleh kekuasaan, undang-undang yang diumumkan tapi tak ditegakkan, kenangan yang dimiliterisasi dan dilupakan secara bergantian. Setiap momen dalam rantai itu mengingatkan kita bahwa penderitaan, ketika tidak diakui, mereproduksi dirinya dalam bentuk baru dan di tanah baru.

Janji keadilan tetap sebagian besar retoris. Namun, ketekunan mereka yang mengingat—penyintas yang masih memegang kunci ke rumah-rumah yang hilang, anak-anak yang tumbuh di kamp pengungsian masih menunggu kembalinya—menyaksikan sesuatu yang tak bisa dihancurkan: penolakan untuk membiarkan penghapusan menjadi putusan akhir.

Jika ada pelajaran dalam sejarah ini, itu adalah bahwa tidak ada keamanan yang dibangun di atas perampasan yang bisa bertahan, dan tidak ada perdamaian yang mengecualikan keadilan yang bisa bertahan. Sampai hak yang terlantar untuk hidup dengan martabat—baik melalui kembalinya atau kepemilikan yang diakui—dihormati, geografi pengasingan akan terus meluas, dan hantu **Sabra dan Shatila** akan berjalan di samping kita semua.

Referensi

- Al-Hout, B. N. (2004). *Sabra and Shatila: September 1982*. London: Pluto Press.
- Arens, M. (1982). Statements to the *Washington Post*, June 1982.
- Brynen, R. (2022). *Palestinian Refugees in Lebanon*. Beirut: Institute for Palestine Studies.
- Fisk, R. (1990). *Pity the Nation: Lebanon at War*. Oxford University Press.
- Folman, A. (Director). (2008). *Waltz with Bashir* [Film]. Sony Pictures Classics.
- General Assembly of the United Nations. (1947). *Resolution 181 (II): Future Government of Palestine*.

- General Assembly of the United Nations. (1948). *Resolution 194 (III): Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator*.
- General Assembly of the United Nations. (1982). *Resolution 37/123: The Situation in the Middle East*.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (1982). *Field Reports on the Lebanon Conflict*. Geneva.
- Israeli Government. (1983). *Report of the Commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut (Kahan Commission)*. Jerusalem: State of Israel.
- Khalidi, W. (1992). *All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948*. Institute for Palestine Studies.
- Khoury, E. (2006). *Gate of the Sun*. New York: Archipelago Books.
- Peteet, J. (2005). *Landscape of Hope and Despair: Palestinian Refugee Camps*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Security Council of the United Nations. (1982). *Resolutions 508 and 521 (1982): Ceasefire and Situation in Lebanon*.
- Shlaim, A. (2000). *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. New York: W. W. Norton.